
Dampak Komunikasi Politik Melalui Media Sosial Terhadap Paradigma Masyarakat

Aisya Khairunnisa¹

¹ Fakultas Ushuluddin Adab dan Dakwah, Institut Agama Islam Negeri Parepare, Indonesia.

Email Korespondensi: aisyakhairunnisaa@gmail.com

Abstrak: Media sosial telah mengubah lanskap komunikasi politik dengan menghadirkan ruang interaksi yang lebih terbuka antara pemerintah, politisi, dan masyarakat. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis bagaimana komunikasi politik melalui media sosial memengaruhi paradigma masyarakat terhadap politik dan demokrasi. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah Pendekatan Kualitatif Deskriptif dengan teknik studi kepustakaan (library research), yaitu menelaah berbagai literatur, jurnal ilmiah, dan publikasi akademik yang relevan. Analisis dilakukan menggunakan kerangka teori Komunikasi Massa, Agenda Setting, Used And Gratifications, Spiral Keheningan, dan Interaksi Simbolik untuk memahami proses penyebaran pesan politik, partisipasi publik, serta pembentukan persepsi masyarakat di ruang digital. Hasil penelitian menunjukkan bahwa media sosial berperan penting dalam meningkatkan partisipasi politik dan literasi publik melalui penyebaran informasi yang cepat dan luas. Namun, di sisi lain, fenomena disinformasi, polarisasi, dan manipulasi opini publik masih menjadi permasalahan serius yang dapat membentuk paradigma masyarakat secara bias dan emosional. Oleh karena itu, diperlukan penerapan etika komunikasi politik dan peningkatan literasi digital agar media sosial dapat berfungsi sebagai ruang demokratis yang sehat dan berintegritas.

Kata Kunci : Komunikasi politik, media sosial, paradigma masyarakat.

PENDAHULUAN

Komunikasi merupakan proses penyampaian pesan dari pengirim kepada penerima dengan tujuan menciptakan pemahaman bersama. Sementara itu, politik dapat dipahami sebagai sarana untuk meraih kekuasaan atau proses pengambilan keputusan dalam ranah pemerintahan. Berdasarkan pengertian tersebut, komunikasi politik dapat diartikan sebagai proses pertukaran pesan yang melibatkan aktor politik dan masyarakat dalam konteks penyampaian gagasan, kebijakan, maupun citra politik. Aktivitas politik senantiasa mewarnai kehidupan masyarakat, terutama menjelang dan selama masa pemilihan umum (PEMILU). Pada periode tersebut, sering muncul kelompok atau individu yang membawa kepentingan tertentu dan menyebarkan informasi menyesatkan (hoaks) demi memperoleh keuntungan politik. (Lanani, 2013)

Komunikasi politik pada dasarnya bertujuan untuk menyosialisasikan ide, kebijakan, dan nilai-nilai politik dari pihak pengirim pesan biasanya kandidat, partai politik, atau pemerintah kepada masyarakat sebagai penerima pesan agar memperoleh dukungan dan kepercayaan publik. Namun, persepsi negatif yang menganggap politik sebagai sesuatu yang kotor dan sarat intrik sering kali muncul akibat praktik komunikasi politik yang tidak etis. Di era perkembangan teknologi informasi saat ini, media sosial hadir sebagai sarana yang memungkinkan masyarakat mengakses sebagai isu politik secara cepat dan luas, sekaligus menjadi ruang baru bagi interaksi politik yang lebih terbuka dan dinamis. (Lanani, 2013)

Di zaman sekarang yang canggih ini, media sosial sudah dijadikan sebagai alat komunikasi politik yang dapat dijangkau dengan sangat mudah oleh Masyarakat umum (publik). (Alam, 2021) Namun, tidak dapat dipungkiri bahwa dalam bermedia sosial akan didapati tantangan-tantangan, terdapat hal positif dan negative dalam bermedia sosial. Salah satu dampak positif dari media sosial ialah kita dengan mudah dapat menerima dan menganalisis fenomena yang terjadi, bukan hanya di tingkat local tetapi juga di tingkatan global atau internasional.

Sebenarnya larangan menyebarkan berita palsu (hoas) telah diatur dalam larangan menyebarkan hoax UU ITE dalam 28 ayat (3) yang berbunyi "Setiap Orang dengan sengaja menyebarkan Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang diketahuinya memuat pemberitahuan bohong yang menimbulkan

kerusuhan di masyarakat. (Mufid & Hariandja, 2019) Namun faktanya, dalam realitas yang terjadi dilapangan masih sering terjadi penyebaran informasi palsu (hoax).

Indonesia merupakan negara dengan angka tinggi penggunaan media sosial. (Utomo, 2013) Nah, tentu dalam bermedia sosial akan didapatkan banyak sekali informasi atau berita yang dapat kita temui, baik informasi sepotong, seperti penyebaran video sepotong yang dapat membuat orang yang melihatnya menjadi salah sangka. Dampak dari penyebaran hoax di media sosial, yakni masyarakat akan terprovokasi, saling menghujat, dan membenci satu sama lain. Selain itu, kita juga akan salah memilih pemimpin yang baik ketika mempercayai isu-isu yang tidak benar (hoax).

Dalam kode etik jurnalistik terdapat unsur-unsur berita yang dapat dijadikan sumber informasi terpercaya yakni :

1. Cermat dan tepat (akurat)
2. Berita harus lengkap, adil, dan berimbang
3. Objektif (berita tidak mencantumkan pendapat atau opini individu tertentu). Artinya, berita tersebut berlandaskan pada kenyataan dan tidak menghakimi pihak manapun.

Hal yang tak kalah pentingnya ialah kita harus memastikan bahwa diri kita sendiri tidak menyebarkan berita palsu (hoax) dengan memegang teguh saring sebelum sharing informasi atau berita yang didapatkan. Adab dan etika dalam bermedia sosial harus terus dijaga agar tidak merugikan diri sendiri maupun orang lain, jangan sampai karena terprovokasi oleh isu-isu hoax kita tidak lagi menghargai pendapat orang lain atau mengeluarkan pendapat yang dapat melukai orang lain. (Lanani, 2013)

Media sosial sudah seharusnya digunakan sebagai tempat memberikan dan mendapatkan informasi yang benar dan akurat. Sehingga, fakta yang terjadi dilapangan ialah akan bisa menghasilkan diskusi antar Masyarakat yang mampu melahirkan pemimpin bangsa yang diharapkan dicita-citakan sesuai demokrasi di Indonesia. Alangkah lebih baiknya lagi, ketika kita mendapatkan berita, informasi, atau kampanye yang tidak benar (hoax), telah di giring sedemikian rupa agar terlihat seperti sesuatu yang benar di media sosial, berita tersebut di silent atau dilaporkan agar tidak ada orang lain yang rugi karena berita tersebut. Kekutamaan informasi dari media sosial akan sangat mempengaruhi pandangan atau perspektif Masyarakat. (Lanani, 2013)

Pemanfaatan media sosial sebagai sarana komunikasi politik juga menghadirkan berbagai permasalahan yang kompleks. Di satu sisi, media sosial memperluas akses masyarakat terhadap informasi politik dan mendorong partisipasi publik dalam diskursus demokratis. Namun disisi lain, muncul persoalan serius seperti penyebaran disinformasi, berita palsu (hoaks), ujaran kebencian, hingga polarisasi politik yang mengancam kualitas demokrasi digital. Fenomena ini tidak hanya memicu konflik opini dan perpecahan sosial, tetapi juga menimbulkan krisis kepercayaan terhadap pemerintah, lembaga politik, bahkan terhadap kebenaran informasi itu sendiri. Rendahnya literasi digital masyarakat semakin memperburuk keadaan, karena banyak pengguna yang sulit membedakan antara informasi faktual dan propaganda politik yang menyesatkan. (Lanani, 2013)

Permasalahan lain yang muncul adalah lemahnya etika dalam komunikasi politik di ruang digital. Banyak aktor politik menggunakan buzzer atau akun anonim untuk menggiring opini publik, menjatuhkan lawan, atau membentuk citra semu demi kepentingan elektoral. Praktik ini menjauhkan komunikasi politik dari nilai kejujuran, transparansi, dan tanggung jawab moral. Akibatnya, masyarakat sering kali memandang politik bukan sebagai sarana partisipasi rasional, melainkan sebagai arena perebutan kepentingan yang manipulatif. Oleh karena itu, diperlukan penelitian yang mendalam mengenai bagaimana komunikasi politik di media sosial mempengaruhi paradigma masyarakat, apakah memperkuat partisipasi dan kesadaran politik, atau justru menimbulkan bias dan polarisasi dalam pandangan politik publik.

METODE

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif dengan menggabungkan beberapa teori komunikasi sebagai dasar analisis. Teori pertama yang digunakan adalah Teori Komunikasi Massa oleh Denis McQuail (2010) yang menjelaskan bahwa media merupakan sarana utama penyampaian pesan secara luas kepada publik. Dalam konteks komunikasi politik di media sosial, teori ini membantu memahami bagaimana pesan-pesan politik dikonstruksi, disebarkan, dan diterima oleh masyarakat melalui platform digital. Selain itu, penelitian ini juga berlandaskan pada Teori Agenda Setting dari McCombs dan Shaw (1972), yang menegaskan bahwa media memiliki kekuatan untuk menentukan isu-isu yang dianggap penting oleh publik. Teori ini relevan dalam menganalisis bagaimana isu politik tertentu menjadi sorotan masyarakat melalui framing dan intensitas pemberitaan di media sosial, sehingga berpengaruh terhadap pembentukan persepsi dan orientasi politik warga.

Selanjutnya, penelitian ini juga menggunakan Teori Uses and Gratifications yang dikemukakan oleh Blumler dan Katz (1974) untuk menjelaskan motivasi masyarakat dalam menggunakan media sosial sebagai sarana memperoleh informasi politik, berdiskusi, dan berpartisipasi dalam ruang publik digital. Penggunaan

teori ini membantu menjelaskan bagaimana masyarakat secara aktif memanfaatkan media sosial untuk memenuhi kebutuhan kognitif dan sosialnya dalam konteks politik. Disisi lain, Teori Spiral Keheningan oleh Elisabeth Noelle-Neumann (1974) digunakan untuk memahami kecenderungan sebagian pengguna media sosial yang enggan menyampaikan pandangan berbeda karena tekanan opini mayoritas, yang dapat memperkuat polarisasi politik. Sementara itu, Teori Interksi Simbolik dari George Herbert Mead turut digunakan untuk melihat bagaimana simbol-simbol politik seperti slogan, tagar, atau visual kampanye membentuk makna dan paradigma masyarakat terhadap aktor politik. Melalui landasan teori tersebut, penelitian ini berupaya menggambarkan secara komprehensif bagaimana komunikasi politik melalui media sosial tidak hanya mempengaruhi perilaku, tetapi juga membentuk secara pandang masyarakat terhadap dinamika politik di era digital.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Dampak Positif Komunikasi Politik

Perkembangan teknologi informasi telah membawa perubahan besar dalam praktik komunikasi politik. Media sosial kini menjadi ruang utama bagi aktor politik untuk berinteraksi dengan masyarakat secara langsung tanpa perantara media konvensional. Politisi, partai, bahkan Lembaga pemerintah memanfaatkan platform seperti Instagram, X (twitter), Youtube, dan Tiktok untuk menyampaikan pesan politik, menjelaskan program kerja, atau membangun citra. (Napitupulu, 2025) Pola komunikasi yang semula bersifat satu arah kini bergeser menjadi dua arah dan interaktif, dimana masyarakat tidak lagi sekedar menjadi penerima pesan, tetapi juga produsen opini politik. Transformasi ini menjadikan media sosial sebagai arena baru bagi pertarungan gagasan, citra, dan kepentingan politik.

Salah satu dampak positif komunikasi politik melalui media sosial adalah meningkatnya partisipasi masyarakat dalam diskursus publik. (Arsyad et al., 2024) Akses informasi politik menjadi lebih terbuka, memungkinkan warga untuk mengetahui kebijakan pemerintah secara cepat dan merata. Misalnya, saat penyelenggaraan Pemilu, media sosial berperan penting dalam menyebarkan informasi terkait visi-misi calon, jadwal kampanye, dan mekanisme pemungutan suara. (Sari, 2025) Masyarakat yang sebelumnya apatis terhadap politik kini terdorong untuk terlibat, baik melalui diskusi daring maupun partisipasi langsung dalam pemilihan.

Selain itu, media sosial juga menjadi wahana pendidikan politik yang efektif. Pemerintah maupun Lembaga masyarakat dapat menggunakan platform digital untuk menyampaikan edukasi politik, seperti pentingnya Pemilu yang jujur, kesetaraan gender dalam politik, atau transparansi kebijakan publik. Misalnya, kampanye "Bijak bermedia sosial" dan "cerdas memilih" yang diinisiasi oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU) menunjukkan bahwa komunikasi politik masyarakat. (Praduta & Meltarini, 2024)

Komunikasi politik melalui media sosial juga mempermudah jarak antara pemerintah dan masyarakat. (Susanto, 2017) Pejabat publik kini dapat berinteraksi langsung dengan warga tanpa harus melalui protokol formal. Melalui akun resmi, pemerintah bisa memberikan klarifikasi, menjawab pertanyaan, dan menerima kritik secara terbuka. Contohnya, penggunaan media sosial oleh Kementerian Komunikasi dan Informatika (KOMINFO) serta pemerintah daerah dalam menyampaikan informasi publik telah meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap transparansi kebijakan. Hubungan dua arah ini membentuk paradigma baru bahwa pemerintah adalah entitas yang terbuka, komunikatif, dan responsive terhadap kebutuhan rakyat.

Media sosial menjadi wadah bagi masyarakat untuk mengekspresikan pendapat secara bebas dan terbuka. Dalam sistem demokrasi, kebebasan berpendapat merupakan elemen penting untuk memastikan adanya kontrol terhadap kekuasaan. (Siar et al., 2025) Melalui komunikasi digital, masyarakat dapat mengkritik kebijakan, memberikan saran, atau mendukung program pemerintah secara langsung.

Dampak Positif Komunikasi Politik

Perkembangan teknologi informasi telah membawa perubahan besar dalam praktik komunikasi politik. Media sosial kini menjadi ruang utama bagi aktor politik. Media sosial, kini menjadi ruang utama bagi aktor politik untuk berinteraksi dengan masyarakat secara langsung tanpa perantara media konvensional. Politisi, partai, bahkan lembaga pemerintah memanfaatkan platform seperti Instagram, X (twitter), Youtube, dan Tiktok untuk menyampaikan pesan politik, menjelaskan program kerja, atau membangun citra. Pola komunikasi yang semula bersifat satu arah kini bergeser menjadi dua arah dan interaktif, dimana masyarakat tidak lagi sekedar menjadi penerima pesan, tetapi juga produsen opini politik. Transformasi ini menjadikan media sosial sebagai arena baru bagi pertarungan gagasan, citra, dan kepentingan politik.

Salah satu dampak positif komunikasi politik melalui media sosial adalah meningkatnya partisipasi masyarakat dalam diskursus publik. (Arsyad et al., 2024) Akses informasi politik menjadi lebih terbuka,

memungkinkan warga untuk mengetahui kebijakan pemerintah secara cepat dan merata. Misalnya, saat penyelenggaraan PEMILU, media sosial berperan penting dalam menyebarkan informasi terkait visi-misi calon, jadwal kampanye, dan mekanisme pemungutan suara. (Sari, 2025) Masyarakat yang sebelumnya apatis terhadap politik kini terdorong untuk terlibat, baik melalui diskusi daring maupun partisipasi langsung dalam pemilihan.

Selain itu, media sosial juga menjadi wahana pendidikan politik yang efektif. Pemerintah maupun Lembaga masyarakat dapat menggunakan platform digital untuk menyampaikan edukasi politik, seperti pentingnya PEMILU yang jujur, kesetaraan gender dalam politik, atau transparansi kebijakan publik. Misalnya, kampanye "Bijak bermedia sosial" dan "cerdas memilih" yang diinisiasi oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU) menunjukkan bahwa komunikasi politik masyarakat. (Praduta & Meltarini, 2024)

Komunikasi politik melalui media sosial juga mempermudah jarak antara pemerintah dan masyarakat. (Susanto, 2017) Pejabat publik kini dapat berinteraksi langsung dengan warga tanpa harus melalui protocol formal. Melalui akun resmi, pemerintah bisa memberikan klarifikasi, menjawab pertanyaan, dan menerima kritik secara terbuka. Contohnya, penggunaan media sosial oleh Kementerian Komunikasi dan Informatika (KOMINFO) serta pemerintah daerah dalam menyampaikan informasi public telah meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap transparansi kebijakan. Hubungan dua arah ini membentuk paradigma baru bahwa pemerintah adalah entitas yang terbuka, komunikatif, dan responsive terhadap kebutuhan rakyat.

Media sosial menjadi wadah bagi masyarakat untuk mengekspresikan pendapat secara bebas dan terbuka. Dalam sistem demokrasi, kebebasan berpendapat merupakan elemen penting untuk memastikan adanya kontrol terhadap kekuasaan. (Siar et al., 2025) Melalui komunikasi digital, masyarakat dapat mengkritik kebijakan, memberikan saran, atau mendukung program pemerintah secara langsung.

Dampak Negatif Komunikasi Politik

Selain dampak positif, komunikasi politik juga memiliki dampak negatif. Dampak negatif yang paling menonjol dari komunikasi politik di media sosial adalah maraknya penyebaran disinformasi dan hoaks. (Nisa, 2024) Media sosial yang bersifat terbuka memungkinkan siapapun menyebarkan informasi tanpa melalui proses verifikasi. (Rahmadhany et al., 2021) Dalam konteks politik, hal ini sering dimanfaatkan untuk menjatuhkan lawan, menciptakan citra palsu, atau menggiring opini publik terhadap isu tertentu. Misalnya, pada momentum PEMILU 2019 dan 2024 di Indonesia, banyak beredar berita palsu mengenai calon presiden, partai politik, atau kebijakan pemerintah yang sengaja dibuat untuk memecah belah masyarakat. (Lasawedy, 2025) Kondisi ini menyebabkan pergeseran paradigma masyarakat menjadi emosional karena opini dibentuk bukan berdasarkan fakta.

Dampak negatif lainnya, yakni meningkatnya polarisasi akibat komunikasi politik yang tidak sehat di media sosial. Perbedaan pandangan politik seringkali berkembang menjadi konflik identitas yang membelah masyarakat dalam kelompok pro dan kontra. fenomena *echo chamber*—yakni kecenderungan pengguna untuk hanya berinteraksi dengan orang yang sepemikiran—semakin memperkuat sekat sosial di ruang digital. (Armanda et al., 2025) Akibatnya, media sosial tidak lagi menjadi wadah dialog demokratis, melainkan arena pertarungan opini yang memperuncing perbedaan. Polarisasi ini tidak hanya terjadi di dunia maya, tetapi juga berimplikasi pada kehidupan sosial nyata, di mana hubungan antarteman, keluarga, bahkan komunitas terpecah karena perbedaan pilihan politik.

Komunikasi politik di media sosial juga kerap digunakan sebagai alat manipulasi opini publik. Banyak aktor politik memanfaatkan jasa buzzer atau akun anonim untuk menyebarkan narasi tertentu yang menguntungkan kepentingan mereka. (Syadila et al., 2025) Strategi komunikasi seperti ini merusak prinsip etika politik karena mengaburkan batas antara informasi publik dan propaganda. Dalam konteks Indonesia, keberadaan buzzer politik telah menimbulkan ketidakpercayaan masyarakat terhadap informasi yang beredar di media sosial. Paradigma masyarakat terhadap komunikasi politik pun menjadi negatif—di mana politik dipersepsikan sebagai arena manipulatif dan penuh kepalsuan, bukan sebagai ruang aspiratif yang mendorong keterbukaan dan rasionalitas.

Akibat dari disinformasi dan manipulasi opini tersebut, muncul krisis kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah dan media arus utama. Ketika masyarakat terus-menerus terpapar berita palsu atau narasi politik yang saling bertentangan, mereka menjadi skeptis terhadap setiap pesan yang disampaikan pemerintah. Dalam jangka panjang, krisis kepercayaan ini dapat melemahkan legitimasi kebijakan publik serta menghambat efektivitas komunikasi pemerintahan. Paradigma masyarakat yang terbentuk adalah bahwa pemerintah cenderung menutupi kebenaran atau memanfaatkan media untuk kepentingan politik, meskipun tidak selalu demikian. Situasi ini berbahaya bagi stabilitas politik dan tata kelola pemerintahan yang baik.

Komunikasi politik di media sosial sering kali lebih menonjolkan aspek hiburan dan citra dibandingkan substansi. Pesan politik dikemas dalam bentuk yang menarik secara visual, tetapi minim kedalaman intelektual.

Akibatnya, masyarakat lebih menilai tokoh politik dari popularitas dan gaya berbicara ketimbang dari gagasan dan programnya. Paradigma politik pun bergeser menjadi pragmatis dan dangkal, di mana viralitas menjadi ukuran keberhasilan komunikasi. Fenomena ini melahirkan budaya politik instan yang berorientasi pada sensasi, bukan pada kualitas ide dan kebijakan. Dalam konteks ini, media sosial justru melemahkan tradisi berpikir kritis yang menjadi fondasi demokrasi yang sehat. (Nurhaidah, n.d.)

Dampak negatif terakhir adalah munculnya fenomena *information fatigue*, yaitu kelelahan informasi akibat banjir konten politik di media sosial. (Wijaya et al., 2025) Masyarakat yang terus-menerus terpapar isu politik menjadi jenuh, apatis, bahkan kehilangan minat untuk berpartisipasi. Ketergantungan terhadap media sosial sebagai sumber utama informasi juga membuat publik rentan terhadap bias algoritma, di mana mereka hanya disuguhkan konten yang sesuai dengan preferensi pribadi. Akibatnya, paradigma politik masyarakat menjadi sempit dan tidak seimbang karena informasi yang diterima bersifat selektif dan terfragmentasi. Dalam jangka panjang, kondisi ini berpotensi menurunkan kualitas partisipasi politik dan kesadaran demokratis masyarakat.

Tantangan dan Strategi Etis dalam Komunikasi Politik Digital

Perkembangan teknologi informasi telah mengubah wajah komunikasi politik menjadi lebih cepat, interaktif, dan terbuka. Melalui media sosial, politisi, pemerintah, dan masyarakat dapat saling bertukar gagasan tanpa batas ruang dan waktu. Namun, kemudahan ini juga menghadirkan tantangan serius, seperti penyebaran disinformasi, ujaran kebencian, dan manipulasi opini publik. Di era digital, pesan politik sering kali dikemas secara emosional untuk menarik perhatian, tanpa memperhatikan kebenaran atau akurasi data. Akibatnya, masyarakat menjadi sasaran dari propaganda dan framing politik yang dapat menurunkan kualitas demokrasi serta merusak kepercayaan publik terhadap pemerintah.

Selain tantangan penyalahgunaan informasi, persoalan etika juga muncul akibat praktik penggunaan *buzzer* dan akun anonim yang digerakkan untuk menggiring opini publik. (Kurniawati, 2023) Strategi semacam ini mengaburkan batas antara komunikasi politik yang sehat dengan propaganda terselubung. Banyak politisi yang lebih fokus membangun citra dan menjatuhkan lawan ketimbang menyampaikan visi dan program yang substansial. Untuk menghadapi hal ini, diperlukan strategi komunikasi politik yang berlandaskan etika—yakni menjunjung tinggi kejujuran, transparansi, dan tanggung jawab moral. (Widayanthi & Wulandari, 2025) Pemerintah dan aktor politik harus memastikan bahwa pesan yang disampaikan tidak menyesatkan publik serta menghormati prinsip keadilan dalam berpendapat di ruang digital.

Strategi etis dalam komunikasi politik digital juga harus melibatkan peningkatan literasi digital masyarakat. (Redhana, 2024) Masyarakat perlu dibekali kemampuan untuk memilah informasi, berpikir kritis, dan memahami konteks politik secara objektif. Di sisi lain, pemerintah dan lembaga pendidikan memiliki peran penting dalam membangun budaya komunikasi publik yang sehat dan demokratis. Dengan mengedepankan nilai transparansi, akuntabilitas, dan edukasi politik, komunikasi digital dapat berfungsi bukan sebagai alat manipulasi, tetapi sebagai sarana untuk memperkuat kepercayaan publik serta memperkuat fondasi demokrasi yang beretika dan berintegritas. (Zumiraj & Gifari, 2024)

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian mengenai "*Dampak Komunikasi Politik melalui Media Sosial terhadap Paradigma Masyarakat*", dapat disimpulkan bahwa media sosial berperan signifikan dalam membentuk pola komunikasi politik yang lebih terbuka, partisipatif, dan interaktif antara pemerintah, politisi, dan masyarakat. Media sosial menjadi sarana efektif dalam meningkatkan literasi politik, mendorong partisipasi publik, dan memperkuat nilai-nilai demokrasi melalui akses informasi yang luas dan dialog dua arah. Namun, di sisi lain, penyebaran disinformasi, polarisasi, serta praktik manipulasi opini publik menimbulkan tantangan serius yang dapat menggeser paradigma masyarakat menjadi bias dan emosional. Oleh karena itu, etika komunikasi politik dan literasi digital menjadi faktor penting dalam menjaga kualitas demokrasi di era digital. Penelitian ini berkontribusi terhadap pengembangan ilmu komunikasi politik dengan memberikan pemahaman empiris tentang bagaimana media sosial tidak hanya sebagai alat penyebaran pesan politik, tetapi juga sebagai ruang pembentukan kesadaran kritis dan tanggung jawab etis dalam berkomunikasi politik di masyarakat modern.

REFERENSI

- Alam, S. (2021). Penggunaan media sosial sebagai alat komunikasi politik. *Avant Garde*, 9(1), 67.
- Alfiyani, N. (2018). Media sosial sebagai strategi komunikasi politik. *Potret Pemikiran*, 22(1).
- Armanda, D. M., Afaf, D., & Krisdahyanto, R. (2025). Filter Bubble dan Echo Chamber: Pengaruh Algoritma Media Sosial terhadap Pola Konsumsi Informasi Mahasiswa Universitas Lampung. *Jurnal Ilmu Komunikasi*

- Dan Sosial Politik*, 2(4), 1124–1129.
- Arsyad, A., Dzaljad, R. G., Nurmiarani, M., & Rantona, S. (2024). Media Sosial sebagai Agen Transformasi Politik: Analisis Pengaruh terhadap Proses Komunikasi Politik. *Jurnal Pendidikan Dan Ilmu Sosial (Jupendis)*, 2(2), 240–251.
- Gustrinanda, R. (2023). Pentingnya Kepercayaan Masyarakat Terhadap Pemilu. *Journal of Practice Learning and Educational Development*, 3(1), 100–106.
- Kurniawati, R. (2023). Buzzer Sebagai Alat Politik Ditinjau Dari Perspektif Penegakan Hukum Di Indonesia. *Justicia Sains: Jurnal Ilmu Hukum*, 8(2), 260–275.
- Lasawedy, A. (2025). *MENGULIK GELIAT BUDAYA DAN POLITIK*. Penerbit Widina.
- Mufid, F. L., & Hariandja, T. R. (2019). Efektivitas Pasal 28 Ayat (1) UU ITE tentang Penyebaran Berita Bohong (Hoax). *Jurnal Rechtsens*, 8(2), 179–198.
- Napitupulu, R. M. (2025). *Strategi Pemasaran Politik Once Mekel Melalui Media Sosial Pada Pemilihan Legislatif Tahun 2024 (Studi Analisis Kampanye)*. Universitas Kristen Indonesia.
- Nisa, K. (2024). Peran literasi di era digital dalam menghadapi hoaks dan disinformasi di media sosial. *Impressive: Journal of Education*, 2(1), 1–11.
- Nurhaidah, S. N. (n.d.). *KOMUNIKASI POLITIK*.
- Praduta, A. Y., & Meltarini, M. (2024). *Strategi Komisi Pemilihan Umum Dalam Meningkatkan Partisipasi Pemilih Pemula Menuju Pemilu Tahun 2024 Di Kabupaten Kutai Kartanegara Provinsi Kalimantan Timur*. IPDN.
- Pureklolon, T. P. (2016). *Komunikasi politik*. Gramedia Pustaka Utama.
- Rafiq, A. (2020). Dampak media sosial terhadap perubahan sosial suatu masyarakat. *Global Komunika: Jurnal Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik*, 3(1), 18–29.
- Rahmadhany, A., Safitri, A. A., & Irwansyah, I. (2021). Fenomena penyebaran hoax dan hate speech pada media sosial. *Jurnal Teknologi Dan Sistem Informasi Bisnis*, 3(1), 30–43.
- Redhana, I. W. (2024). *Literasi Digital: Pedoman Menghadapi Society 5.0*. Samudra Biru.
- Sari, A. P. (2025). *Peran Media Sosial dalam Meningkatkan Partisipasi Pemilih Pemula pada Pemilu Tahun 2024 di KPU Kota Metro*. IAIN Metro.
- Siar, L., Lambonan, M. L., & Mamengko, R. S. (2025). Perlindungan Kebebasan Berpendapat Pada Pemilihan Umum di Kabupaten Minahasa Selatan. *Nuansa Akademik: Jurnal Pembangunan Masyarakat*, 10(1), 73–84.
- Susanto, E. H. (2017). Media sosial sebagai pendukung jaringan komunikasi politik. *Jurnal Aspikom*, 3(3), 379–398.
- Syadila, A. V., Quinna, M. S., Auliya, S. H., & Aminulloh, A. (2025). Industri Buzzer dan Polarisasi Politik di Era Digital: Perspektif Ekonomi Politik Media. *Tuturlogi: Journal of Southeast Asian Communication*, 6(1), 28–38.
- Utomo, D. A. (2013). *Motif pengguna jejaring sosial Google+ di Indonesia*. Petra Christian University.
- Widayanthi, D. G. C., & Wulandari, C. I. A. S. (2025). *Communication Ethics: Etika Komunikasi Modern di Era Digital*. Deepublish.
- Wijaya, F. V., Gobai, F. A., Suciawan, A. G., Biondy, M., & Ardyan, E. (2025). Kelelahan Digital Di Era Media Sosial: Studi Tentang Kelebihan Informasi, Kecemasan, Dan Fear Of Missing Out (FOMO). *Jurnal Online Manajemen ELPEI*, 5(1), 1271–1285.
- Zumiraj, M. A., & Gifari, H. (2024). KOMUNIKASI POLITIK DALAM REFORMASI PENDIDIKAN SEKOLAH DASAR: SEBUAH TINJAUAN LITERATUR. *Pendas: Jurnal Ilmiah Pendidikan Dasar*, 9(3), 1331–1343.